

---

# Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Makassar

Dahlia Baharuddin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Departm Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, Universitas Muslim Indonesia, Makassar City, South Sulawesi, Indonesia

---

## ABSTRACT

---

The ability of the region to manage regional original income can be used as the basic capital of regional government in financing regional development and businesses. This study aims to empirically examine the effect of Regional Original Income on Makassar City Regional Expenditures from 2010 to 2019. This type of research is quantitative research, using secondary data in the form of time series data on the Realization of Regional Original Income and Regional Expenditures for Makassar City for the 2010-2019 observation period. The research method uses descriptive analysis, simple linear regression with the ordinary least square (OLS) method, partial test, and test of determination with the help of SPSS version 25 software. The results of this study indicate that the Regional Original Income has a positive and significant effect on the Makassar City Regional Expenditure.

**Keywords:**

Regional Original Income, Regional Expenditure

---

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [dahliah.dahliah@umi.ac.id](mailto:dahliah.dahliah@umi.ac.id)

## 1. Introduction

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama priode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,23% pada tahun 2012. Pada tahun 2012 perekonomian Indonesia masih stabil, ini dibuktikan dengan tidak terpengaruhnya indonesia terhadap krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat.

Setiap daerah mempunyai hak dalam mengelola keuangannya sendiri, dalam hal mengelola keuangan daerah nya sendiri disebut dengan Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan. Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja Modal menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.<sup>18</sup> Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut UU No.17 Tahun 2003 bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf (a) Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perludi berikan sumber- sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas- tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Nursyam, 2019).

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayah nya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup (Nursyam, 2019). Bastian (2006), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan milik negara. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan di bidang industry atau memiliki sumberdaya alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat

kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah (Suandi, 2016). Kota Makassar sebagai salah satu bagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Hal ini dapat di lihat dari proporsi PAD rata-rata 23,2% dari seluruh pendapatan daerah yang mengalami peningkatan rata-rata 17,7% per tahun (Afdaliah, 2016)

Pertumbuhan PAD Kota Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi yakni pada tahun 2016 sampai dengan 2017 hal ini berarti Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri yakni salah satunya belanja daerah dan akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah.

Intensifikasi atau optimalisasi penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber atau jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang sudah ada, namun belum terkelola secara optimal atau masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan agar pencapaian realisasi penerimaannya bertambah. Ekstensifikasi atau penambahan jenis obyek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan Daerah dan selanjutnya di Perdakan ke dalam bentuk Pajak dan Retribusi daerah serta jenis penerimaan daerah lainnya.

## **2. Literature Review**

### *2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Menurut Olubukunola (2011), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Idris (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, semakin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD.

Dalam upayanya untuk memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahannya. Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwasannya pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja modal, karena adanya saling keterkaitan satu sama lain dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat guna melancarkan pemerintahan daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan formula sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Lain-lain PAD yang sah

## *2.2. Belanja Daerah*

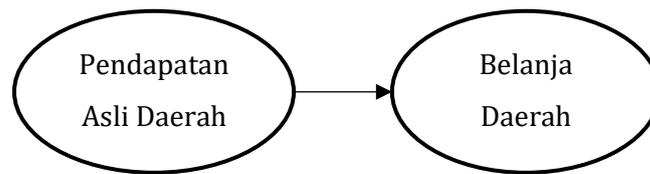
Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009) pengeluaran pemerintah pada awalnya harus di analisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kainde (2013) mengemukakan bahwa, "Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

- 1) Belanja Administrasi Umum
- 2) Belanja Operasi
- 3) Belanja Modal
- 4) Belanja Transfer
- 5) Belanja Tak Tersangka

### *2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Ferdiansyah et al (2018). Pendapatan asli daerah juga berperan penting dalam memenuhi belanja daerahnya yang merupakan kemampuan untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu menghimpun dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar kontribusi pendapatan asli suatu daerah terhadap belanja daerah tentunya akan semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana atau bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat .

Saat anggaran yang disusun memberikan dampak defisit atas realisasinya, hal ini menandakan tingginya persaingan dalam pengalokasian atas sumberdaya pada anggaran pemerintahan daerah. Abdullah, (2016) saat penganggaran di sektor publik akan diikuti agency problem dikarenakan kepentingan konstituen dan anggota terpilih dan perilaku oportunistik budget actors. DPRD memiliki kecenderungan perilaku oportunistik dalam mengusulkan anggaran menjadikan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan dalam menjalankan alokasi belanja yang telah diusulkan dalam pembahasan dalam rancangan Perda APBD. Dimana dalam perubahan kenaikan alokasi belanja yang diajukan DPRD mengandung masalah keagenan yang akan memberikan manfaat dalam memenuhi self interest dewan perwakilan. Dalam penelitian (Andrean & Sari, 2020; Fatimah, 2020; Aminus,2018) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah



**Gambar 1.** Definisi Operasional

**H1:** Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kota Makassar.

### 3. Method, Data, and Analysis

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data Sekunder berupa data time series Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Makasar periode pengamatan 2010-2019. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Data yang digunakan berupa data time series dari Kota Makassar Tahun 2015-2019. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, regresi linear sederhana dengan metode ordinary least square (OLS) bantuan software SPSS versi 25

$$Y = a + bX + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan :

Y : Belanja Daerah

a : Konstanta

X : Pendapatan Asli Daerah

b : Koefesien Regresi

$\varepsilon$  : Error term

Selanjutnya dilakukan pengujian Hipotesis yang di antaranya uji parsial dan uji determinasi .

### 4. Result and Discussion

#### 4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil analisa Deskripsi Obyek Penelitian dapat dilihat pada deskriptif statistik dibawah ini yang menjadi sampel penelitian adalah Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan 2019.

**Tabel 1.** Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pad	10	210068,21	1337231,09	8024161,27	802416,1270	395380,75979
Belanja Daerah	10	1378034,45	3548006,64	26983644,07	2698364,4070	792960,79992

Sumber: Output SPSS, diolah 2021

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan adalah 10 tahun. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar minimum adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 210.068,21 juta dan Pendapatan Asli Daerah maksimum Kota Makassar adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.337.231,09 juta. Nilai rata-rata hitung untuk Pendapatan Asli Daerah adalah Rp. 802.416,13 juta. Sedangkan standar deviasi sebesar 395380,76 juta. Standar deviasi yang berada dibawah nilai rata-rata menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar antara Pendapatan Asli Daerah terendah dan tertinggi. Belanja Daerah Kota Makassar minimum pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 1.378.034,45 juta dan Belanja Daerah maksimum tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.548.006,64 juta. Nilai rata-rata hitung untuk Belanja Daerah adalah Rp. 2.698.364,41 juta. Sedangkan standar deviasi sebesar 792.960,79 juta. Standar deviasi sebesar yang berada dibawah nilai rata-rata menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar antara Belanja Daerah terendah dan tertinggi.

#### 4.2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan pengolahan data analisa regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS 25, diperoleh hasil seperti dimuat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1163462,000	188751,969		6,164	,000
	PAD	1,913	,213	,954	8,976	,000

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH  
 Sumber: Output SPSS, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2, maka diperoleh persamaan model regresi antara variabel dependen PAD (X), terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah (Y) sebagai berikut:

$$Y = 1163462,000 + 1,913X$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 1163462,000 mengindikasikan bahwa secara umum apabila Variabel dependen PAD (X) terhadap variabel dependen yaitu bernilai konstan (tidak berubah) maka Belanja Daerah (Y) sebesar 1163462,000 poin dan nilai koefisien PAD (X) sebesar 1,913 mengindikasikan bahwa PAD (X) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan PAD (X) sebesar 1 poin maka akan meningkatkan Belanja Daerah (Y) sebesar 1,913 poin

#### 4.3. Uji t (Parsial)

Uji statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas t- statistic. Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh PAD (X), secara individual terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah (Y). Jika nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  atau 5% maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

**Tabel 3.** Hasil Uji Parsial

Model		t	Sig.
1	(Constant)	6,164	,000
	PAD	8,976	,000

Sumber: Output SPSS, diolah 2021

Hasil pengujian dengan analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai t-hitung PAD (X) sebesar 8,976 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas PAD (X) sebesar 0,000 > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

#### 4.4. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen.

**Tabel 4.** Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,954a	,910	,898	252763,18233

Sumber: Output SPSS, diolah 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi pada tabel 15, nilai R square yang diperoleh sebesar 0,910 yang menunjukkan bahwa Belanja Daerah (Y) pada penelitian ini dipengaruhi oleh PAD (X) sebesar 91,0% dan sisanya 9,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil variabel PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menandakan bahwa variabel PAD memiliki hubungan yang searah dengan Belanja Daerah. Sementara dari hasil uji parsial (t), didapati bahwa variabel PAD di Kota Makassar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar.

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. PAD ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwantoro et al (2019) menyatakan bahwa PAD memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting terhadap alokasi belanja daerah. Karena dengan adanya PAD mendorong kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program

pembangunan daerah. Selain itu peningkatan pemerintah daerah dalam belanja modal pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

## 5. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan maka simpulan pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar terhadap Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2010 sampai dengan 2019. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebaiknya perencanaanya lebih ditingkatkan agar jumlah belanja daerah pada Pemerintah Kota Makassar tidak melebihi pendapatan yang diterima dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi?

### Acknowledgement (if any)

Author (s) may acknowledge a person or organization that helped him/her/them in many ways. Please use the singular heading even if you have many acknowledgments.

### Reference

#### Journal

- Abdullah, Syukriy & Afrah Junita. (2016). Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Modus*, 28(2), 185-202.
- Aminus, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 9(1), 47-55.
- Andrean, A., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 1984-2000.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Equity*, 22(2), 197-214.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44-52.
- Ferreiro, J., Garcia Del Valle, T.M., Gomez, C. (2009). Is the composition of public expenditures converging in EMU countries, *Journal of Post Keynesian Economics*
- Idris, Irlan Fery. (2016). Potential Increase in Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. *European Journal of Accounting, Auditing And Finance Research*. Vol.4 No.1 PP 28- 42.
- Kainde, Christian. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3, 393-400.

- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Olubukunola, Olusola. (2011). Boosting Internally Generated Revenue of Local Governments In Ogun State, Nigeria. Vol.8 No.1 336-348.
- Purwanto, P., & Setyowati, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 26(1).